

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 18 Undang-undang Tahun 1995 yang menyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan meningkatkan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Pasal tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi melalui kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang dimaksud adalah Otonomi Daerah yang berarti sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nawang, 2016).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping pengelolaan terhadap

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada perlu ditingkatkan dan daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD nya sehingga dengan semakin banyak sumber-sumber PAD yang dimiliki maka daerah akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang akan digunakan dalam membangun daerahnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi sektor pariwisata. Pemerintah perlu mengembangkan dan memfasilitasi tempat pariwisata sehingga sektor pariwisata dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Dengan adanya pengembangan sektor pariwisata, pemerintah daerah berharap sektor pariwisata ini mampu meningkatkan industri terutama yang erat hubungannya dengan pelayanan pariwisata seperti perhotelan, rumah makan, transportasi dan lain-lain. Menurut Spillane (1987), peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing).

Pariwisata merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti,

pemandu wisata (*guide*), biro perjalanan, tour operator, akomodasi, rumah makan dan restoran, *artshop*, *money changer*, transportasi dan yang lainnya.

Pariwisata ini juga banyak menawarkan berbagai jenis produk yang beragam, mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata sejarah, wisata buatan, hingga wisata minat khusus. Menurut Wahab (2003) dalam bukunya "*Tourism Management*" pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri (Wahab, 2003).

Pariwisata dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu dengan memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa, terciptanya lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha di sektor formal dan informal semakin luas, meningkatkan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui pajak dan retribusi, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Pariwisata dalam pandangan islam sangat berhubungan dengan pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan. Tujuan wisata dalam islam adalah untuk belajar ilmu

pengetahuan dan cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan-Nya. Tujuan besar lainnya untuk syiar dan menunjukkan keagungan Allah dan Rasul-Nya.

Surat Ar-Rum ayat 9 yang berbunyi:

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri”.

Dari ayat diatas, menjelaskan pentingnya meningkatkan dan menggali potensi wisata yang ada. Potensi wisata menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak swasta. Hal ini perlu dilakukan agar potensi dapat dikelola dengan baik. Kerjasama dalam mengelola potensi yang ada dapat memberikan efek yang baik terhadap kondisi sosial masyarakat, terkelolanya pariwisata dengan baik ini juga salah satu ajaran dalam islam yakni mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya.

Dengan demikian Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara tropis yang sangat berpotensi dalam pembangunan industri pariwisata. Industri pariwisata di Indonesia umumnya dan di Daerah Isrimewa

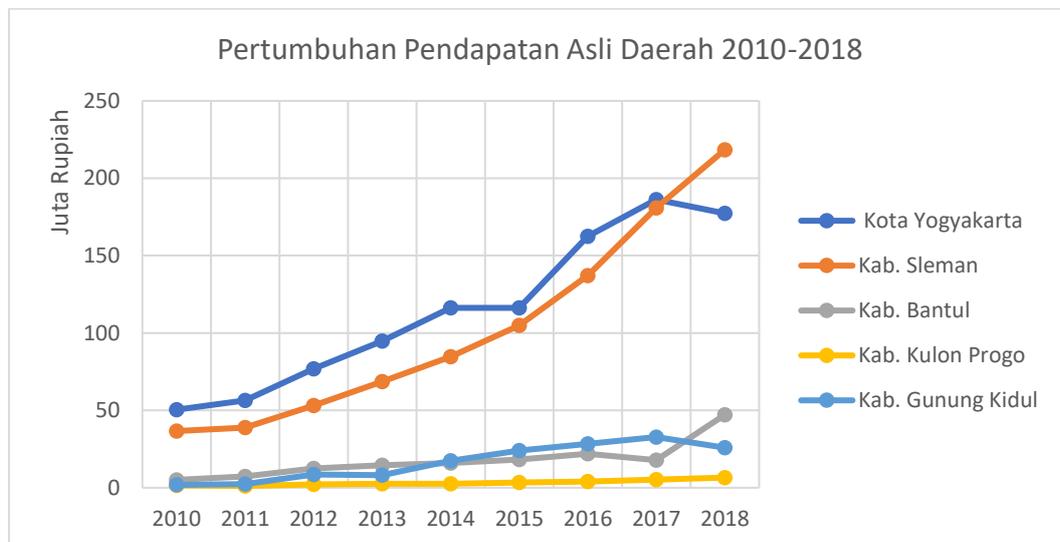
Yogyakarta (DIY) khususnya yang telah berkembang sangat pesat. Perkembangan industri pariwisata sangat ini berdampak pada penerimaan devisa suatu negara, industri pariwisata juga telah mampu memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam mengatasi pengangguran. Pengembangan industri ini telah menjadi agenda penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu menjaga dan melakukan konservasi lingkungan dari berbagai macam kehancuran. Secara tidak langsung akibat adanya perkembangan kepariwisataan yang secara global serta meningkatkan kunjungan wisatawan internasional telah berdampak kepada tuntutan penyediaan komponen industri pariwisata. Keberhasilan dalam pengembangan sektor kepariwisataan dapat meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah melalui beberapa faktor seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, jumlah kamar hotel yang disediakan, jumlah biro perjalanan wisata dan jumlah rumah makan dan restoran yang tersedia.

Tabel 1. 1
Jumlah Objek Wisata dan Wisatawan di DIY Tahun 2010-2018

Tahun	Objek Wisata (Unit)	Wisatawan (Orang)	
		Wisnus	Waisman
2010	97	7.758.466	398.927
2011	114	8.833.086	509.157
2012	97	10.814.261	693.295
2013	177	11.154.232	512.000
2014	177	13.395.266	548.121
2015	176	18.281.909	740.409
2016	135	20.933.798	511.545
2017	146	25.349.012	601.781
2018	186	25.915.686	600.102

Sumber: Dinas Pariwisata DIY 2010-2018

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah objek wisata pada tahun 2010 hingga 2018 cenderung mengalami peningkatan fluktuatif hal ini disebabkan karena perbedaan pencatatan data Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) pada Kabupaten/Kota di DIY setiap tahunnya. Trend jumlah wisatawan setiap tahunnya mengalami peningkatan, wisatawan dari dalam negeri lebih banyak yang berkunjung ke DIY dibandingkan dengan wisatawan dari luar negeri. Jumlah wisatawan mancanegara terbanyak antara tahun 2010 hingga 2018 adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 740.409 orang dengan kunjungan terbanyak mengunjungi ODTW di Kabupaten Sleman, sementara itu kunjungan wisatawan nusantara terbanyak mengunjungi ODTW di Kota Yogyakarta.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY 2010-2018

Grafik menggambarkan bahwa selama sembilan tahun terakhir penerimaan daerah dari sektor pariwisata DIY selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung ke DIY. Dengan adanya keragaman produk dan potensi pariwisata dengan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang sangat memadai seperti halnya, penginapan, akomodasi, tempat wisata, atraksi wisata, dan fasilitas rekreasi yang merupakan aset pariwisata yang dapat menjadi faktor penunjang dalam pengembangan industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penerimaan daerah dari sektor pariwisata yang menjelaskan bahwa jumlah wisatawan mempunyai arah positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dapat dilihat dari banyaknya jumlah wisatawan yang datang berwisata ke daerah tujuan wisata. Hal ini dikarenakan semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan semakin lama mereka tinggal di daerah

tujuan wisata maka semakin banyak uang yang akan dikeluarkan, adapun wisatawan yang akan memesan kamar untuk tempat tinggal sementara selama berwisata (Tama (2017), Qadarrochman (2010), Novitri dkk (2014)).

Menurut Trisnawati dkk. (2011) dengan memperhatikan kenyamanan tamu maka akan sangat menentukan jumlah wisatawan dan lama menginap. Seiring dengan pertumbuhan hotel, maka jumlah kamar hotel yang tersedia juga meningkat, sehingga penerimaan daerah akan terus meningkat dari pajak hotel.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Li dkk (2016) tentang penerimaan daerah dari pariwisata yang dilihat dari jumlah kamar hotel yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mengetahui penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kamar hotel, wisatawan, dan pendapatan perkapita memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan dalam penelitian Novitri dkk (2014) menjelaskan bahwa secara parsial jumlah kamar hotel tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah.

Dalam penelitian sebelumnya membuktikan bahwa jumlah objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah (Punkkasari, 2018; Qadarrochman, 2010; Tama, 2017; Widiyanto, 2013). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wdiyanti (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah objek wisata tidak berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan daerah. Novitri dkk, (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2011), Zaman dkk (2010), dan Punnkasari (2018) membuktikan bahwa jumlah biro perjalanan wisata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

Keberhasilan dalam pengembangan sektor pariwisata yang berarti, secara tidak langsung akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, yang dimana kepariwisataan merupakan salah satu komponen utama dengan memperlihatkan beberapa faktor-faktor yang mmpengaruhinya, seperti; jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kamar hotel, jumlah objek wisata, dan jumlah biro perjalanan wisata yang tersedia.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing serta dapat memperbaiki struktur ekonomi daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, bahwa Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang dapat meningkatkan penerimaan daerah jika potensi-

potensi pariwisatanya dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikembangkannya potensi-potensi pariwisata yang ada dapat menarik minat wisatawan yang otomatis akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah kamar hotel yang terjual. Para wisatawan yang melakukan pariwisata biasanya mereka yang memiliki pendapatan menengah keatas. Dengan pendapatan yang mereka miliki bisa melakukan perjalanan wisata yang pastinya dapat menghabiskan sebagian dari pendapatan mereka untuk berwisata dan hal itu dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata DIY.
2. Apakah jumlah kamar hotel berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata DIY.
3. Apakah jumlah objek wisata berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
4. Apakah biro perjalanan wisata berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata DIY.
2. Mengidentifikasi pengaruh jumlah kamar hotel terhadap penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata DIY.
3. Mengidentifikasi pengaruh jumlah objek wisata terhadap penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata DIY.
4. Mengidentifikasi pengaruh jumlah biro perjalanan wisata terhadap penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata DIY.

E. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten dan Kota Yogyakarta maka adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten dan Kota Yogyakarta.
2. Dapat memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai jumlah wisatawan, jumlah rumah makan dan restoran, dan jumlah kamar hotel sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah di Kabupaten dan Kota Yogyakarta.